

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) PADA DINAS KESEHATAN DI KOTA MEDAN

Nasirwan,¹ Ade Vani Meilani², Aprillia Siahaan³, Ayona Artia Sitohang^{4*1}

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia
ayonasitohang@gmail.com

Abstract

One of the roles of public sector accounting is to enhance the quality of financial reporting. The purpose of this research is to understand the impact of leadership, personnel, and internal control systems on the quality of local government financial statements at the Medan City Health Department. The research method used is quantitative, with data collection carried out through questionnaires. The population and sample size used is 30 people. The data analysis technique applied is multiple linear regression. The research findings indicate that leadership, personnel, and internal control systems have a positive and significant impact on the quality of local government financial statements..

Key Words: Leadership, Personnel, Internal Control Systems, Quality of Local Government Financial Statements (LKPD)

Abstrak

Salah satu peran dari akuntansi sektor publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, aparatur, dan sistem pengendalian intrnal terhadap kualits laporak keuangan pemerintah daerah di Dinas Kesehatan Kota Medan. metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Jumlah populasi dan sampel yang digunakan adalah 30 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, aparatur, dan sistem pengendalian internal brpengaru positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kata kunci: Kepemimpinan, Aparatur, Sistem Pengendalian internal, Kualitas LKPD

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan dokumen yang sangat penting dalam konteks manajemen dan akuntabilitas keuangan publik di tingkat daerah. LKPD menyediakan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan suatu pemerintah daerah, mencakup aspek pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban. Dokumen ini berfungsi

¹ Korespondensi Penulis

sebagai alat utama untuk menilai seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangan mereka. Selain itu, LKPD memainkan peran kunci dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya, seperti anggota legislatif, auditor, dan lembaga pengawas. (Ahmad, 2024)

Secara umum, LKPD terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Setiap komponen ini memberikan wawasan yang berbeda tentang kondisi keuangan daerah. Laporan Realisasi Anggaran, misalnya, menunjukkan sejauh mana pendapatan dan belanja yang dianggarkan telah terealisasi selama periode tertentu. Ini membantu mengevaluasi apakah pemerintah daerah mengikuti rencana anggaran yang telah disusun dan menyoroti potensi masalah seperti pemborosan atau efisiensi yang rendah. (Dambra, 2023)

Neraca memberikan gambaran tentang posisi keuangan pemerintah daerah pada akhir periode tertentu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Ini adalah indikator penting untuk memahami seberapa stabil keuangan suatu daerah, dan dapat memberikan petunjuk tentang kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya. Laporan Arus Kas menunjukkan bagaimana kas mengalir masuk dan keluar dari pemerintah daerah, memberikan wawasan tentang likuiditas dan kemampuan daerah untuk membiayai operasi sehari-hari serta proyek-proyek jangka panjang. Laporan Perubahan Ekuitas menampilkan perubahan ekuitas pemerintah daerah selama periode tertentu, yang mencerminkan akumulasi surplus atau defisit dari tahun ke tahun. (Argento, 2023)

LKPD yang berkualitas tinggi harus memenuhi berbagai kriteria, seperti ketepatan waktu, keakuratan, dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Di Indonesia, misalnya, LKPD harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menetapkan prinsip-prinsip dan pedoman untuk pelaporan keuangan sektor publik. Pemerintah daerah yang mampu menghasilkan LKPD yang sesuai dengan standar ini menunjukkan komitmen mereka terhadap akuntabilitas dan transparansi (Han, 2023)

Pentingnya LKPD tidak dapat dilebih-lebihkan. Dokumen ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan oleh berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, anggota legislatif, auditor, dan masyarakat umum. Informasi dalam LKPD dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan, menilai kinerja pemerintah daerah, serta memonitor penggunaan dana publik. Selain itu, LKPD yang transparan dan dapat dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan mengurangi risiko korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks yang lebih luas, LKPD yang baik juga dapat berdampak pada investasi dan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Investor dan lembaga keuangan cenderung lebih percaya dan tertarik untuk berinvestasi di daerah yang memiliki laporan

keuangan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, LKPD bukan hanya sekadar dokumen akuntansi, tetapi juga alat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat daerah. (Khairan, 2024)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah instrumen penting dalam menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sebagai bagian dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Kota Medan, Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menyajikan LKPD yang berkualitas, yang tidak hanya memenuhi standar akuntansi yang ditetapkan, tetapi juga menggambarkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Ketidakmampuan dalam memenuhi standar ini dapat mengakibatkan berbagai masalah yang dapat berdampak serius pada operasi dan reputasi Dinas Kesehatan serta pemerintah daerah secara keseluruhan.

Dalam konteks Dinas Kesehatan di Kota Medan, temuan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan penyusunan LKPD. Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat ketidakakuratan atau kesalahan dalam pelaporan keuangan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut bisa meliputi kurangnya pemahaman mengenai standar akuntansi yang berlaku, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, hingga kurangnya kapasitas atau kompetensi dari staf yang bertanggung jawab atas penyusunan LKPD. (Putri, 2023)

Kelemahan dalam sistem pengendalian internal dapat mencakup beberapa hal, seperti tidak adanya pemisahan tugas yang jelas di antara staf yang menangani aspek-aspek keuangan, kurangnya prosedur atau pedoman yang jelas terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta tidak adanya mekanisme kontrol yang memadai untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Hal ini bisa berdampak negatif pada kualitas LKPD, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi serius.

Salah satu konsekuensi utama dari rendahnya kualitas LKPD adalah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketika laporan keuangan tidak akurat atau tidak transparan, masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana publik secara efektif. Ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah, dan dapat mempengaruhi legitimasi pemerintah daerah di mata warganya. (Putri, 2023)

Selain itu, permasalahan dalam LKPD dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak terkait. Laporan keuangan yang berkualitas rendah mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan Dinas Kesehatan, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan yang informatif dan berdasarkan data. Ini

dapat menyebabkan kesalahan dalam alokasi sumber daya dan perencanaan program, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Permasalahan dalam LKPD juga dapat mempermudah terjadinya penyimpangan keuangan. Tanpa sistem pengendalian internal yang kuat dan laporan keuangan yang transparan, risiko kecurangan atau penyalahgunaan dana meningkat. Ini tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan Dinas Kesehatan, tetapi juga merusak reputasi pemerintah daerah dan dapat menyebabkan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif. Pemerintah daerah harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan staf untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menyusun LKPD yang akurat dan sesuai dengan standar. Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal harus menjadi prioritas utama untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan keuangan. Penegakan prosedur audit internal dan eksternal yang ketat juga akan membantu memastikan bahwa LKPD yang dihasilkan adalah akurat, transparan, dan dapat diandalkan.

Dengan melakukan langkah-langkah ini, Dinas Kesehatan Kota Medan dapat meningkatkan kualitas LKPD-nya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, dan mencegah terjadinya penyimpangan keuangan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat terus diberikan kepada masyarakat Kota Medan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Dinas Kesehatan Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Jumlah populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai Dinas Kesehatan kota Medan dengan jumlah 30 orang dan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 30 orang dengan metode sampling jenuh. teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.277	3.322		-1.588	.124
	KEPEMIMPINAN	.416	.036	.811	11.491	.000
	APARATUR	.126	.041	.213	3.052	.005
	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	.330	.044	.525	7.458	.000

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH,

Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS (2024)

Berikut adalah persamaan yang dapat dibentuk dari tabel di atas:

1. Nilai koefisien dari kepemimpinan adalah 0.416 yang menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Nilai koefisien dari aparatur adalah 0.126 yang menunjukkan bahwa aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Nilai koefisien dari Sistem Pengendalian internal adalah 0.330 yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kota Medan. hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepemimpinan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau sebaliknya semakin kurang baik kepemimpinan semakin kurang baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kepemimpinan dalam sektor publik memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan

yang baik adalah indikator bahwa pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, praktik akuntansi yang tepat, dan mekanisme pelaporan yang transparan dan akurat. Kepemimpinan di sini tidak hanya merujuk pada figur kepala daerah seperti gubernur atau bupati, tetapi juga pada struktur kepemimpinan di seluruh jajaran birokrasi dan manajerial pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan bagaimana sumber daya publik dikelola dan digunakan, serta memberikan gambaran mengenai kesehatan fiskal dan efisiensi operasional pemerintah. Kepemimpinan yang kuat dan efektif berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan dengan memastikan bahwa semua aspek dari proses akuntansi, pelaporan, dan pengendalian internal dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Salah satu aspek penting dari kepemimpinan dalam konteks ini adalah kemampuan untuk menetapkan visi dan arah strategis yang jelas terkait dengan manajemen keuangan publik. Pemimpin yang mampu mengartikulasikan visi ini akan memberikan motivasi dan arah bagi staf dan pejabat pemerintah daerah untuk menjaga integritas dan kualitas proses akuntansi. Mereka juga akan menetapkan kebijakan dan prosedur yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Kepemimpinan juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya organisasi. Pemimpin yang menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas akan menciptakan budaya yang mendorong staf untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai ini. Dengan adanya budaya organisasi yang kuat, laporan keuangan akan lebih akurat dan dapat dipercaya karena staf akan lebih mungkin untuk mematuhi prosedur dan peraturan yang ada.

Selain itu, kepemimpinan yang efektif akan memastikan adanya pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Pemimpin yang baik akan mendukung pembentukan sistem pengendalian internal yang kuat, yang mencakup pengawasan atas penggunaan anggaran, audit internal, dan penilaian risiko. Pengendalian internal yang baik membantu mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya.

Kepemimpinan juga berperan dalam memastikan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan dengan transparansi dan keterbukaan. Pemimpin yang mendukung komunikasi terbuka dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dewan legislatif, dan lembaga pengawas, akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Transparansi ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana dana publik digunakan dan memberikan umpan balik yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa depan.

Dengan demikian, hubungan antara kepemimpinan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah hubungan yang kompleks dan saling terkait. Kepemimpinan yang kuat dan efektif memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada kualitas laporan keuangan, mulai dari penetapan visi dan arah strategis, pembentukan budaya organisasi, pengawasan dan pengendalian internal, hingga komunikasi dan transparansi. Ketika semua elemen ini berfungsi dengan baik, hasilnya adalah laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan kemampuannya untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab.

Pengaruh Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Aparatur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kota Medan. hal ini menunjukkan bahwa semakin baik aparatur semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau sebaliknya semakin kurang baik aparatur semakin kurang baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hubungan antara aparatur dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah tema yang penting untuk dipahami dalam konteks akuntansi sektor publik. Aparatur dalam konteks ini merujuk pada pegawai negeri sipil, pejabat pemerintah, dan staf lainnya yang terlibat dalam proses penyusunan, penyajian, dan pelaporan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan refleksi dari seberapa baik aparatur menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka terkait pengelolaan keuangan publik.

Faktor pertama yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas akuntansi dan keuangan secara efisien dan efektif. Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Kompetensi ini tidak hanya terkait dengan kemampuan teknis dalam akuntansi, tetapi juga pemahaman tentang regulasi, kebijakan, dan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik yang berlaku.

Kedua, integritas aparatur memainkan peran penting dalam kualitas laporan keuangan. Integritas melibatkan komitmen untuk bertindak secara etis dan transparan dalam segala aspek pekerjaan. Aparatur yang memiliki integritas tinggi cenderung menghasilkan laporan keuangan yang jujur, tidak memihak, dan bebas dari kesalahan material atau penipuan. Dalam konteks ini, pengawasan internal dan pengawasan eksternal dapat membantu memastikan bahwa aparatur berpegang pada standar etika yang tinggi.

Ketiga, kepemimpinan dan budaya organisasi juga berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kepemimpinan yang kuat dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan akuntabilitas. Budaya organisasi yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap kepatuhan terhadap aturan dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemimpin yang memberikan contoh baik dan menginspirasi aparatur untuk bekerja dengan integritas dan kompetensi akan berdampak positif pada hasil akhir laporan keuangan.

Keempat, ketersediaan sumber daya juga menjadi faktor penting dalam hubungan antara aparatur dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya yang dimaksud mencakup alat dan teknologi, anggaran yang memadai, serta akses ke pelatihan dan pengembangan profesional. Aparatur yang memiliki akses ke sumber daya yang memadai lebih mungkin menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi karena mereka dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Kelima, sistem dan proses akuntansi yang kuat akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemerintah daerah yang memiliki sistem akuntansi yang terstruktur dengan baik, didukung oleh prosedur yang jelas, dan didukung oleh teknologi modern akan lebih mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Aparatur yang bekerja dalam lingkungan yang memiliki sistem dan proses yang kuat akan lebih fokus pada analisis dan penilaian, daripada menghabiskan waktu untuk tugas-tugas administratif yang dapat diotomatisasi.

Dalam kesimpulan, hubungan antara aparatur dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kompleks dan melibatkan banyak faktor. Kompetensi, integritas, kepemimpinan, budaya organisasi, ketersediaan sumber daya, serta sistem dan proses akuntansi yang kuat, semuanya memainkan peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi standar yang tinggi. Meningkatkan kualitas laporan keuangan membutuhkan pendekatan holistik yang memperhatikan semua aspek ini, dengan tujuan akhir untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Sistem Pengendalian Internal semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau sebaliknya semakin kurang baik Sistem Pengendalian Internal semakin kurang baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Sistem Pengendalian Internal (SPI) memainkan peran krusial dalam menjaga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. SPI mencakup berbagai kebijakan, prosedur, dan mekanisme kontrol yang dirancang untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Di tingkat yang lebih luas, SPI bertujuan untuk mencegah kecurangan dan kesalahan, menjaga aset, serta memastikan keakuratan dan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan.

Ketika SPI efektif, beberapa hal positif terjadi dalam konteks laporan keuangan. Pertama, kualitas data meningkat. SPI memastikan bahwa data yang masuk ke dalam laporan keuangan dihasilkan melalui prosedur yang ketat dan terstruktur. Ini mencakup pengendalian terhadap transaksi keuangan, rekonsiliasi bank, serta audit internal yang teratur. Penggunaan teknologi informasi dalam pengendalian internal, seperti sistem ERP (Enterprise Resource Planning), juga berkontribusi terhadap kualitas data dengan mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan konsistensi proses.

Kedua, SPI yang kuat membantu mencegah penyelewengan dan kecurangan. Pengendalian internal yang mencakup segregasi tugas, otorisasi transaksi, dan pemantauan yang ketat membantu mendeteksi dan mencegah tindakan yang tidak etis atau ilegal. Hal ini memberikan kepercayaan kepada publik dan pemangku kepentingan bahwa keuangan pemerintah daerah dikelola dengan aman dan jujur, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas laporan keuangan karena ada kepercayaan bahwa data yang disajikan adalah akurat.

Ketiga, SPI yang efektif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ketika pengendalian internal berfungsi dengan baik, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi dan melaporkan risiko serta menyusun rencana mitigasi yang tepat. Akuntabilitas yang meningkat berarti bahwa pejabat publik lebih bertanggung jawab terhadap penggunaan dana publik, dan transparansi memungkinkan pemantauan oleh auditor eksternal dan masyarakat umum. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.

Namun, ada tantangan dalam mengimplementasikan SPI yang kuat. Pemerintah daerah seringkali menghadapi kendala sumber daya, baik finansial maupun manusia. Kurangnya pelatihan atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengendalian internal dapat mengakibatkan sistem yang lemah, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan, teknologi, dan pengembangan kebijakan yang solid adalah langkah penting untuk memperkuat SPI.

Secara keseluruhan, hubungan antara SPI dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat erat. SPI yang kuat memastikan bahwa laporan keuangan akurat, andal, dan mencerminkan realitas keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, kualitas laporan keuangan yang baik menciptakan kepercayaan publik, mengurangi risiko

kecurangan, dan meningkatkan akuntabilitas. Penguatan sistem pengendalian internal harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan ini

KESIMPULAN

kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kota Medan. hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepemimpinan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau sebaliknya semakin kurang baik kepemimpinan semakin kurang baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Aparatur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kota Medan. hal ini menunjukkan bahwa semakin baik aparatur semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau sebaliknya semakin kurang baik aparatur semakin kurang baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kota Medan. hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Sistem Pengendalian Internal semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau sebaliknya semakin kurang baik Sistem Pengendalian Internal semakin kurang baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Y.-O. (2024). Assessment of effects in advances of accounting technologies on quality financial reports in Jordanian public sector. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(1),.
- Allisa, S. &. (2023). Peran Akuntabilitas Pada Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal EMA*, 8(2), 170-178.
- Argento, D. &. (2023). Are public sector accounting researchers going through an identity shift due to the increasing importance of journal rankings? *Critical Perspectives on Accounting*, 96, 102537.
- Dambra, M. E.-T. (2023). The economic consequences of GASB financial statement disclosure. *Journal of Accounting and Economics*, 75(2-3), 101555.
- Han, H. S. (2023). Accounting and auditing with blockchain technology and artificial intelligence: A literature review. *International Journal of Accounting Information Systems*, 48, 100598.
- Khairan, U. I. (2024). Dampak Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(3).

- Lennox, C. &. (2022). A review of China-related accounting research in the past 25 years. *Journal of Accounting and Economics*, 74(2-3), 101539.
- Putri, A. N. (2023). Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12(1), 99-102.